

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anggoro, Freddy Haris dan Teddy, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asch, Peter, 1983, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Willey & Sons Inc, Canada.
- Diantha, I Made Pasek, 2015, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2014, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, West Group, St. Paul.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriya, 2011, *Teori dan Pengujian Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indrati, Maria Farida, 2020, *Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Is, Muhammad Sadi, 2022, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- International Finance Corporation (IFC), 2018, *Indonesia Corporate Governance Manual*, 2nd Edition, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan usaha)*, Srikandi, Surabaya.
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2017, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Lubis, Andi Fahmi, *Et.Al.*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Nasarudin, M. Irsan, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, *"Antitrust Issues Involving Minority Shareholding and Interlocking Directorates"*, The Policy Roundtables, 2008, DAF/COMP.
- Prayoko, Robert, 2015, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, Man S, dan Rai Mantili, 2012, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Keni Media, Bandung.
- Sitompul, Asril, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirajuddin, *Et. Al.*, 2016, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suteki, Galang Tuafani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Silalahi, M. Udin, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*, Elex Media, Jakarta.

Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Suhasril dan M. Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Scherer, F.M., 1994, *Competition Policies for an Integrated World Economy*, The Brookings Institution, Washington DC.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Komisi Pengawas Persingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Artikel dan Jurnal

Ahmar, Nurmala, *et al*, 2016, “*Satu Dekade Investigasi Interlocking Directorate: Sebuah Model Deteksi Praktik Monopoli*”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 7, No. 3, 2016.

Ansari, Teuku Syahrul, *et al*, 2020 “*SOEs Under the Soeharto New Order Regime and Reformasi Era*”, International Journal of Advanced Science and Technolog, Vol. 29, No. 5, 2020.

Andih, Sterry Fendi, 2019, “*Pengaturan Bukti Petunjuk Pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Rangka Hukum Pembuktian Di Indonesia*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 8 No.4, Desember, 2019.

Barzuza, Michal dan Quinn Curtis, 2015, “*Board Interlocks and Corporate Governance*”, Delaware Journal of Corporate Law, Vol. 39, 2015.

Borgatti, Stephen P. dan Pacey C. Foster, 2003 “*The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology*”, Journal of Management, Vol. 29, No. 6, 2003.

Charity, May Lim, 2016, “*Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)*”, Jurnal Indonesian Journal of Legislation, Vol. 13, No. 1, 2016.

Davis, Gerald F., 1996, “*The Significance of Board Interlocks for Corporate Governance*”, Corporate Governance an International Review, July, Vol. 4, No. 3, 1996.

Desilia, Monica, 2016, “*Pengaruh Interlocking Directorate Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2024*”, Artikel Ilmiah, STIE Perbanas, Surabaya, 2016.

- Dooley, Peter C., 1969, "*The Interlocking Directorate*", *The American Economic Review*, Vol. 59, No. 3, Juni 1969.
- Fachri, Faisal dan Iwan Joesoef, 2021, "*Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)*", *Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Gabrielsen, Tommy S., 2011, "*Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention*", *European Law Review*, Vol. 36, Issue 6, 2011.
- Haunschild, Pamela R. dan Christine M. Beckman, 1998, "*When Do Interlocks Matter?: Alternate Sources of Information and Interlock Influence*", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 43, No. 4, 1998.
- Jacobs, Michael E., 2014, "*Combating Anticompetitive Interlocks: Section 8 of the Clayton Act as a Template for Small and Emerging Economic*", *Fordham International law Journal*, Vol. 37, No. 3, 2014.
- Joesoef, Faisal Fachri dan Iwan, 2021, "*Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)*", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2 No. 1, Februari 2021.
- Melanie, Dinni, 2011, "*Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN Ditinjau dari Regulasi dan Praktek*" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 5, 2011.
- Nibraska, Zufar Zain, 2023, "*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Fovernance Dalam Tata Kelola BUMN*" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2023.
- Ma'arif, Syamsul, "*Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*.
- Orchad, Christian, 2016, "*Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya*", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II, Nomor 2, 2016.
- Pratiwi, Risanti Suci, 2019, "*Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas*", *Jurnal lfx Renaissance, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2019.

- Prihandoko, Nugroho Dwi, 2018, "*Pengaruh Rangkap Jabatan (Interlocking Directorate) dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*", Artikel Ilmiah, STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, 2018.
- Petersen, Vidir, 2016, "*Interlocking Directorates in the European Union: An Argument for Their Restrictions*", *European Business Law Review*, Vol. 27, No. 6, 2016.
- Rifai, Badriyah, 2001, "*Mencermati Isi dan Visi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli*", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 17, 2001.
- Rifai, Badriyah, 2009, "*Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate di Perusahaan Publik*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3, 2009.
- Samawati, Putu, 2017, "*Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas*" *Jurnal Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 24, No. 3, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2004, "*Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", *Jurnal hukum*, 2004.
- Thepot, Florence, et al, 2016, "*Interlocking Directorates and Anticompetitive Risks: An Enforcement Gap in Europe?*", *Concurrences*, No. 1, 2016.
- Travers, Arthur H. Jr., 1968, "*Interlocks in Corporate Management and the Antitrust Law*", *Texas Law Review*, Vol. 46, No. 6. 1968.
- Valce, Valeria, 2013, "*Interlocking Directorates: An Italian Antitrust Dilemma*", *Journal of Competition Law & Economics*," Vol. 9, No. 2, 2013.
- Wafiya, 2014, "*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2014.

4. Tugas Akhir dan Skripsi

- Andreas,Nico, 2014, *Rule of Reason Yang Digunakan Oleh KPPU Dalam Putusan Perkara Dugaan Praktek Monopoli Terhadap Pelanangan Jasa Taksi Di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*, Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.
- Alfarizi, Muhammad Fikri, 2014, *Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan*

Usaha Tidak Sehat, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014

Fariq, Muhammad Umar, 2021, *Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 26 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Di PT PNK Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

Geodewa, Darcyando, 2019, *Analisis Dugaan Jabatan Rangkap Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Kerja Sama Operasi (KSO) Garuda Indonesia Dengan Sriwijaya Group)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Kertawirja, Zakiyah Maulida, 2020, *Hubungan Afiliasi Melalui Jabatan Rangkap Pleaku Usaha Yang Bersaing (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Malik, Muhammad Abdul, 2022, *Pengaturan Jabatan Rangkap Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.

Sugita, Fega Vande, 2021, *Analisis Rangkap Jabatan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dalam BUMN dan BUMS Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2021.

Tampubolon, Iin Parlina Y, 2010, *Analisis Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 7 Tahun 2010 Tentang Rangkap Jabatan (Studi Kasus: Perbandingan Putusan KPPU Mengenai Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Group Cineplex dan PT JICT)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

5. Makalah/Pidato/Naskah

Pasaribu, Manaek SM, 2016, "Challenges of Indonesian Competition Law and Some Suggestions for Improvement," ERIA Discussion Paper Series 04, 2016.

Rachbini, Didik. J., 1999, *Konsentrasi Ekonomi dan Masalah Monopoli*, Makalah dalam Seminar Persaingan Sehat, Jakarta.

Rencana Strategis Kementrian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024.

6. Internet

Anonim, CNN Indonesia, “*Kenaikan Harga Tiket Pesawat Sempat Tembus 120 Persen*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen>, diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

Achmad Dwi Afriyadi, “*KPPU Temukan Bos BUMN Rangkap Jabatan 22 Perusahaan*”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5504059/kacau-kppu-temukan-bos-bumn-rangkap-jabatan-22-perusahaan?page=2>, diakses pada 27 Juli 2025 pukul 00.48.

Adil Al Hasan, “*Seknas Fitra Minta Prabowo Larang Anak Buah Rangkap Jabatan di BUMN*”, https://www.tempo.co/ekonomi/seknas-fitra-minta-prabowo-larang-anak-buah-rangkap-jabatan-di-bumn-1633066#goog_rewarded, diakses 28 Juli 2025 pukul 05.00.

Andi Cahyo Bawono, *Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-undangan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6386/fungsi-dan-peran-penjelasanlampiransuatu-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

CNN Indonesia, “*KPPU Setop Penyelidikan Rangkap Jabatan Direksi Garuda*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826190608-92-424794/kppu-setop-penyelidikan-rangkap-jabatan-direksi-garuda>, diakses pada 12 Januari 2023.

Dinda Sabhrina, *Ada Beberapa Pengurus Danantara Rangkap Jabatan di Kmemetrian, Ini Tanggapan Dewan Penasehat Presiden*, <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-beberapa-pengurus-danantara-rangkap-jabatan-di-kementerian-ini-tanggapan-dewan-penasihat-presiden-1211883?utm>, dikunjungi pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 02.52.

Ditho H.F Sitompoel, 2025, “*UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas*”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e/>, diakses 26 Juli 2025, pukul 04.25.

Hufron, “*Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Pandangan Konstitusi*”, https://timesindonesia.co.id/kopi-times/547254/rangkap-jabatan-wakil-menteri-dalam-pandangan-konstitusi?utm_source=chatgpt.com#google_vignette, dikunjungi pada 28 Juli 2025 pukul 02.38.

Hendrik Khoirul Muhid, “*Rangkap Jabatan Menteri di Struktural Danantara: Rosan Roeslani, Erick Thohir, Dony Oskaria, hingga Sri Mulyani*” ,<https://www.tempo.co/ekonomi/rangkap-jabatan-menteri-di>

struktural-danantara-rosan-roeslani-erick-thohir-dony-oskaria-hingga-sri-mulyani--1215021, diakses pada 26 Juli 2025 pukul 06.40.

Faisal Basri dikutip dari Hukumonline, “KPPU Perlu Waspada Kebijakan Pemerintah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-perlu-waspada-kebijakan-pemerintah-lt4c0cce4sdb275f?page=all>, diakses pada 23 Januari 2023.

Koran Digital Harian Lentera Today: Inspirasi Perubahan, *Aroma Monopoli Kursi Petinggi BUMN: KPPU (62 Direksi/Komisaris Rangkap Jabatan, Satu Orang Kuasai 22 Perusahaan*, www.lenteratoday.com, Edisi 24 Maret 2021, Halaman Utama, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2022 Jam 14.33.

Kurnia Ramdhana, 2023, *Penelitian Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan*, Indonesian Corruption Watch.

Mangunsong Rully, “Peran Strategis BUMN dalam Membangun Indonesia: Pelopor, Pelayan Publik dan Penggerak Ekonomi”, <https://www.kompasiana.com/rullymangunsong9979/66839a5a34777c4f901baed3/peran-strategis-bumn-dalam-membangun-indonesia-pelopor-pelayan-publik-dan-penggerak-ekonomi>, diakses pada 2 juni 2025, pukul 09.32.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “*OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*”, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en>, di akses 26 Juli 2025.

Rob Alport, “UK: *Interlocking Directorates: Looking for Signs of Collusion, Conflict of Interest and Overboarding*”, <https://www.mondaq.com/uk/directors-and-officers/853280/interlocking-directorates-looking-for-signs-of-collusion-conflict-of-interest-and-overboarding>, diakses pada 4 Februari 2023.

Siaran Pers KPPU No. 22/KPPU-PR/III/2021, “*Tekankan Pencegahan, KPPU Sarankan Kementrian BUMN Untuk Mencabut Aturan yang Memperkenankan Rangkap Jabatan*”, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Siaran-Pers-No.-22_KPPU-PR_III_2021.pdf, diakses 15 Januari 2023.

Siti Fatimah, “397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019>, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2023 Jam 22.22.

Tsarina Maharani dan Diamanty Meiliana, Kompas, “*Ombudsman: 2016 hingga 2019, ada 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan*,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/15583601/ombudsman-2016-hingga-2019-ada-397-komisarisbumn-rangkap-jabatan>, diakses pada 04 Agustus 2023 pukul 00.53.

Tahir Saleh, “*Begini Strategi Garuda di Sriwijaya*”, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20190120104950-4-51482/begini-strategi-garuda-di-sriwijaya> , diakses pada 21 Januari 2023.

Tirto, “*Siapa Untung dan Buntung Dari Aksi Gandengan Garuda-Sriwijaya*”, <https://tirto.id/siapa-untung-dan-buntung-dari-aksi-gandengan-garuda-amp-sriwijaya-dacC> , diakses pada 21 Januari 2023.

Web Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “*Tekankan Pencegahan, KPPU Sarankan Kememntrian BUMN untuk Mencabut Aturan yang Memperkenankan Rangkap Jabatan*”, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/tekankan-pencegahan-kppu-sarankan-kementerianbumn-untuk-mencabut-aturan-yang-memperkenankan-rangkap-jabatan/>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2022 Jam 14.29.

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia, “*Ada Aroma Kartel dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115125211-92-360952/ada-aroma-kartel-dalam-kenaikan-harga-tiket-pesawat>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

